

# ANALISIS SANKSI INTERNASIONAL UNI EROPA TERHADAP RUSIA ATAS ANEKSASI KRIMEA

Rismawati<sup>1</sup>, Mega Nisfa Makhroja<sup>1</sup>, Kinanti Rizsa Sabilla<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

[rismaawati.171@gmail.com](mailto:rismaawati.171@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research discusses the reasons why the European Union is still imposing international sanctions against Russia for its annexation of Crimea. This study uses Relational Foreign Policy Theory to see how the foreign policy issued by the European Union to Russia. Moreover, this research uses the concept of international sanctions to see the form of foreign policy implemented by the European Union over Russia's annexation to Crimea. The writer also uses the Annexation concept to observe Russia's actions against Crimea.*

*The result of this research is the European Union continues to impose international sanctions on Russia for several reasons, namely the European Union builds its identity as the originator of peace. Besides, to promote one of the objectives of its foreign policy, namely the Common Foreign and Security Policy (CFSP), these international sanctions are also to bring political changes to the destination country. As well as the demands of norms Council Common position 2008/94/CFSP. In addition, because of the involvement of the United States. This is related to Atlantic solidarity which also involves NATO. It is occurred because of the dependency of the European Union on the United States and NATO in terms of security. This also has the effect of continuing to enforce the European Union's Relational Foreign Policy in the form of International Sanctions against Russia for its annexation of Crimea.*

**Key Word:** *Annexation of Krimea, Relational Foreign Policy, Russia, International Sanctions, European Union.*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Alasan Uni Eropa masih tetap memberlakukan sanksi internasionalnya terhadap Rusia atas aneksasinya di Krimea. Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri Relasional untuk melihat bagaimana kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Uni Eropa kepada Rusia. Menggunakan konsep sanksi internasional untuk melihat bentuk dari kebijakan luar negeri yang diterapkan Uni Eropa atas Aneksasi Krimea oleh Rusia. Kemudian menggunakan konsep Aneksasi untuk mengamati tindakan Rusia terhadap Krimea.

Hasil penelitian ini adalah Uni Eropa masih terus memberlakukan sanksi internasionalnya terhadap rusia karena beberapa alasan yaitu Uni Eropa membangun identitasnya sebagai pencetus Perdamaian. Kemudian untuk mempromosikan salah satu tujuan dari kebijakan luar negerinya yaitu Common Foreign and Security Policy (CFSP), sanksi internasional tersebut juga untuk membawa perubahan politik politik ke negara tujuan. Serta adanya tuntutan norma Council Common position 2008/94/CFSP. Di samping itu juga karena adanya keterlibatan Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan solidaritas atlantik yang juga melibatkan NATO. Dapat dikatakan demikian karena ketergantungan Uni Eropa kepada Amerika Serikat dan NATO dalam bidang keamanan. Ini juga berpengaruh dari terus diberlakukannya Kebijakan Luar Negeri Relasional Uni Eropa yang berbentuk Sanksi Internasional terhadap Rusia atas aneksasi Krimea.

**Kata Kunci:** Aneksasi Krimea, Kebijakan Luar negeri Relasional, Rusia, Sanksi internasional, Uni Eropa.

## PENDAHULUAN

Sejak Perang Dunia II aneksasi Rusia di Krimea dianggap sebagai pelanggaran paling serius terhadap perbatasan Eropa. Aneksasi merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menyatukan wilayah secara formal menjadi bagian wilayah kedaulatan teritorialnya (Iskandar, 2020). Aneksasi Rusia di Krimea dimulai sejak 2014. Pada tanggal 22 Februari tahun 2014 Presiden Viktor Yakunovich melarikan diri ke Rusia, oleh sebab itu terjadilah kekosongan kekuasaan sementara di Ukraina (Sahrir, 2019). Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Rusia untuk menganeksasi Krimea. Rusia mengirimkan pasukan ke Krimea yang merupakan wilayah kedaulatan Ukraina pada 1 Maret 2014. Tentara dari Rusia ini dilengkapi dengan peralatan tempur yang memadai. Intervensi militer Rusia di Krimea menyebabkan hubungan antara Rusia dan Ukraina menjadi tidak harmonis dan secara langsung mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Ukraina menganggap bahwa Rusia telah melanggar hak dan kedaulatan wilayahnya dengan mengintervensi Krimea yang berada dalam wilayah kedaulatan Ukraina.

Rusia menganeksasi Krimea karena memiliki posisi penting bagi Rusia dimana letak Ukraina yang strategis, menjadi wilayah strategis diantara Rusia, Uni Eropa dan wilayah Laut Hitam Turki. Ukraina merupakan wilayah penting bagi Rusia sebab, secara relatif dapat memberikan jarak aman terhadap rival politiknya di sebelah Barat yakni Uni Eropa. Kemudian, yang paling penting terdapat wilayah Laut Hitam yang menjadi pusat Pangkalan militer Rusia di kota Sevastopol, Krimea. Krimea sendiri sebagai bagian dari Ukraina adalah sebuah Republik Otonomi khusus yang memiliki populasi lebih dari 2 juta jiwa, yang terdiri dari 58,3% etnis Rusia dan 24,3% etnis Ukraina dan 12,1% etnis Tartar, 1,4% Belarusia beserta sisanya ada Jerman, Bulgaria, Karaim, Yunani serta Armenia. Krimea berada di wilayah kota Sevastopol yang menjadi basis angkatan laut di Laut Hitam (Fahmi, 2020).

Dasar dari dilakukannya aneksasi di Krimea ini adalah referendum yang dilaksanakan pada 16 Maret 2014, yang hasilnya menyatakan bahwa 96% warga Krimea setuju dan memilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Presiden Putin menandatangani dekret yang sebelumnya sudah disetujui oleh *Russian Federation Council*, yang menjadikan Krimea secara resmi bagian dari Rusia. Meski demikian hasil dari referendum ini memunculkan banyak pertentangan dan tidak diakui masyarakat internasional. Ukraina pun tidak mengakui hasil referendum ini dan masih menganggap Krimea sebagai bagian dari Ukraina karena referendum yang dilakukan Rusia dianggap bertentangan dengan konstitusi Ukraina (Kartini, 2014).

Hasil dari referendum ini dianggap tidak wajar, hingga pada 18 Maret 2014 setelah hasil referendum keluar ditandatangani sebuah undang-undang mengenai penggabungan Krimea dan Sevastopol ke Federasi Rusia, yang ditandatangani di Moskow (Oktaviano, 2015). Dianggap tidak wajar karena setelah adanya referendum terdapat banyak laporan yang masuk ke *Human Rights Monitoring Mission in Ukraine* (HRMMU) terkait dengan pelecehan dan intimidasi terhadap masyarakat yang kontra terhadap referendum tersebut. Hasil referendum ini diragukan juga karena diduga adanya intervensi Rusia yang mendorong masyarakat Krimea untuk bergabung bersama Federasi Rusia yang mengakibatkan hal tersebut dianggap sebagai tindakan aneksasi (*Ukraine Crisis: Timeline*, 2014).

Banyak pihak yang menilai Rusia melanggar hukum internasional karena merebut salah satu wilayah Ukraina secara sepihak melalui sebuah referendum. Seperti pelanggaran terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB artikel 2 (3) dan 2 (5), di sini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk

menyelesaikan konflik internasional menggunakan cara damai dan dilarang menggunakan kekuatan militer, kekerasan, ancaman terhadap negara lain sehubungan dengan integritas teritorial dan kemerdekaan politiknya.

Pelanggaran integritas teritorial yang telah dilakukan Rusia di Krimea membuat Uni Eropa pun turut memberikan kebijakan berupa sanksi internasional untuk menangani masalah ini. Kasus di Krimea ini yang menjadi fokus Uni Eropa untuk menangani masalah ini adalah penurunan krisis yang terjadi dan juga membantu Ukraina dalam menciptakan kondisi yang stabil, sejahtera dan demokratis bagi semua warga negaranya. Dengan ini salah satu bentuk sanksi internasional Uni Eropa adalah memberikan sanksi ekonomi dalam pernyataan EUCO 158/ 14 (Anggraini, 2018). Tujuan dikeluarkannya sanksi ini adalah untuk menekan Rusia atas pelanggaran dan menuntut Rusia mundur dalam posisinya dalam krisis di Krimea. Sebelum memberikan sanksi ekonomi, Uni Eropa telah terlebih dahulu merespon konflik ini melalui tindakan diplomatik. Ketika pertemuan G-7 diadakan di Brussels pada 4-5 Juni 2014 (Fahmi, 2020). Tindakan diplomatik masih belum berhasil maka dilanjutkanlah dengan memberikan sanksi-sanksi lainnya

Konflik antara Rusia dan Ukraina terkait aneksasi Krimea ini menjadi menarik sebab adanya keterlibatan Uni Eropa dimana Uni Eropa juga ikut memberikan kebijakan kepada Rusia dalam konflik tersebut. Kebijakan yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Rusia dapat dikatakan tidak efektif dan tidak berjalan sesuai yang diinginkan, pada kenyataannya kebijakan yang diberikan Uni Eropa tersebut malah memberikan dampak negatif bagi perekonomian Uni Eropa itu sendiri. Meskipun demikian Uni Eropa terus memberikan kebijakan berupa sanksi-sanksi untuk menekan Rusia. Situasi tersebut menjadi menarik dikaji lebih lanjut untuk melihat alasan Uni Eropa terus memberlakukan sanksi internasionalnya terhadap Rusia terkait aneksasi di Krimea Tahun 2014 disamping dampak negatif yang ditimbulkan.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pertama, yaitu penelitian yang ditulis oleh Ali Muhammad dan Muhammad F. Athifi yang berjudul "**Aneksasi Rusia atas Krimea, Sanksi Uni Eropa, dan Penguatan Hubungan Strategis antara Rusia-Tiongkok**" (Muhammad, 2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai dampak dari sanksi Barat atas Rusia berupa peningkatan hubungan strategis antara Rusia dan Tiongkok. Rusia menganeksasi Krimea pada tahun 2014 yang menimbulkan ketegangan baru antara Uni Eropa dengan Rusia. Rusia berani bertindak lebih jauh karena faktor strategis Ukraina bagi Rusia dan Putin yang berusaha menunjukkan sikap tegas pada pihak Barat. Aneksasi ini pada akhirnya membuat Barat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Sanksi ekonomi dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Kanada termasuk Uni Eropa.

Sanksi ekonomi Uni Eropa menargetkan Bank, perusahaan minyak, dan sektor pertahanan Rusia. Perusahaan Eropa dilarang meminjam dari atau meminjamkan uang kepada lima bank utama milik pemerintah Rusia selama lebih dari 30 hari. Sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa menargetkan juga industry pertahanan, pertambangan, intelijen, perkapalan dan perkeretaapian serta adanya pembatasan bekerja sama dengan bank perusahaan energi Rusia. Hal tersebut menyebabkan hubungan Rusia dan Tiongkok makin menguat. Berseteru dengan Barat, Rusia justru mendapat keuntungan finansial dan ekonomi terutama bagian energi melalui kesepakatan dengan Tiongkok. Hubungan Rusia dan Tiongkok mengalami banyak kemajuan. Sanksi Barat memiliki konsekuensi strategis bagi

hubungan internasional Rusia, yakni hubungan ekonomi dan militer dengan Tiongkok yang semakin kuat.

Penelitian selanjutnya merupakan karya dari Ruth Intan Sari yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Uni Eropa atas Tindakan Aneksasi Rusia di Krimea Ukraina”** (Sari, 2021). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat preskriptif dengan teknik pengumpulan data Studi Pustaka dan teknik analisis data berupa teknik deduktif. Secara umum penelitian ini akan menjelaskan mengenai Sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia atas aneksasi di Krimea. Intervensi yang dilakukan Rusia dikatakan sebagai tindakan yang ilegal dan dikecam oleh banyak pihak termasuk Uni Eropa. Sebagai organisasi internasional Uni Eropa merespon tindakan yang dilakukan oleh Rusia ini dengan menjatuhkan Sanksi. Sanksi yang diberikan berupa sanksi ekonomi yang merupakan strategi dalam konflik internasional melalui cara ekonomi agar tujuan politik dapat tercapai.

Sanksi merupakan tindakan pencegahan yang memungkinkan Uni Eropa sebagai salah satu organisasi internasional yang mewakili negara-negara di Eropa untuk menanggapi dengan cepat dan perkembangan politik yang bertentangan dengan tujuan dan nilai-nilainya. Uni Eropa menggunakan sanksi ekonomi dan keuangan dengan hati-hati. Dalam *Common Foreign and Security Policy/ CFSP*, kerangka hukum sanksi Uni Eropa memiliki peran penting. Bentuk penjatuhan sanksi Uni Eropa salah satunya pada tanggal 31 Maret 2014 memberlakukan sanksi sektoral terhadap Rusia, termasuk embargo senjata dengan mengadopsi keputusan Dewan Uni Eropa 2014/ 512/CSFP dan peraturan dewan Uni Eropa. No 833/2014 yang sejak 1 Agustus 2014 telah diberlakukan. Pada awalnya embargo tersebut hanya berlaku hingga tahun 2015 akan tetapi terus dilanjutkan sampai dengan tahun 2021.

Tinjauan berikutnya yakni penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina”**, yang ditulis oleh Mahfud Masaaguni, Muhammad Nasir Badu, dan Muhammad Ashry Sallatu (Mahfud Massaguni, Muhammad Nasir Badu, 2022). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data telaah pustaka dan jenis penelitian deduktif. Penelitian ini menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri, Konsep Kepentingan Nasional, serta Konsep Geopolitik. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah Pengaruh yang didapatkan oleh Rusia dari sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa sehubungan dengan Aneksasi Rusia di Krimea. Adanya krisis Ukraina menyebabkan relasi antara Rusia dan Uni Eropa menjadi renggang. Sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa ini dipicu oleh Aneksasi yang dilakukan di Krimea oleh Rusia sendiri.

Uni Eropa telah meluncurkan sejumlah sanksi diplomatik maupun ekonomi sejak awal Maret 2014. Sanksi yang diterapkan Uni Eropa ini berdampak negatif dan positif bagi Rusia. Dampak negatif seperti hubungan kedua belah pihak berada di titik terendah yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Rusia. PDB yang mengalami penurunan secara substansial, Rubel Rusia turun, inflasi juga meningkat dengan cepat, serta nilai mata uang Rusia menjadi menurun sebesar 50% terhadap US dolar, dampak positifnya yakni salah satu sanksi Uni Eropa yaitu sanksi terhadap individu mengakibatkan *rally around the flag effect*. Sanksi ini membantu pemerintah Rusia untuk memberikan dan memobilisasi dukungan masyarakat terhadap pemerintah di Rusia serta di kalangan orang Rusia sikap patriotisme dan nasionalismenya menjadi berkembang.

Penelitian selanjutnya yaitu **jurnal yang berjudul “Efektivitas Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Rusia Dalam Kasus Aneksasi Krimea** ditulis oleh Dewi Mentari Siregar (Siregar, n.d.). Penelitian ini menggunakan teori Interdependensi atau teori saling ketergantungan yang lahirnya dari perspektif liberalis. Penelitian ini menjeaskan terkait dengan efektivitas dari diterapkannya sanksi Ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia. Setelah Rusia dianggap menganeksasi Krimea pada tahun 2014 Uni Eropa pun memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi ini tidak ditujukan untuk menghukum tetapi untuk mengubah kebijakan atau aktivitas yang dikenai sanksi entah itu negara, individu ataupun suatu badan tertentu. Adapun yang diusahakan Uni Eropa agar konsekuensi dari penerapan sanksi ini dapat diperkecil terhadap masyarakat sipil ataupun kegiatan-kegiatan resmi lainnya. Sanksi yang diberikan Uni Eropa kepada Rusia sehubungan dengan aneksasi di Krimea menurut penulis jurnal ini tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan sikap Rusia akan kepemilikan Krimea yang tidak berubah meskipun sudah diberikan hukuman berupa sanksi ekonomi. Dapat dikatakan tidak efektif ketika tidak tercapainya tujuan dari diterapkannya sanksi ekonomi tersebut.

Uni Eropa memberikan sanksi ekonomi dengan tujuan agar Rusia bisa melepaskan wilayah Krimea ke dalam kedaulatan Ukraina. Namun tujuan ini tidak bisa dicapai. Jika dilihat ketidakefektifan sanksi ekonomi ini disebabkan oleh kekuatan ekonomi dari kedua belah pihak sama-sama besar. Perekonomian Rusia sempat jatuh akan tetapi berusaha untuk menemukan cara untuk bangkit kembali, yakni dengan menetapkan tujuh kebijakan untuk menanggapi sanksi ekonomi dari Uni Eropa. Lebih lanjut tidak efektifnya sanksi ekonomi tersebut karena di kawasan Krimea Rusia mempunyai kepentingan tersendiri. Dapat dilihat dari Pangkalan Laut yang dibangun oleh Rusia sejak tahun 1977 di Krimea yang bernama Armada Laut Hitam.

Penelitian terakhir yang penulis gunakan sebagai acuan adalah jurnal yang ditulis oleh Irvand Sahir dengan judul **“Aneksasi Rusia Terhadap Krimea Tahun 2014”** (Sahir, 2019). Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian eksplanatif dengan teknik analisis data berupa metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Kepentingan Nasional dan Teori Aneksasi. Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses dari aneksasi Rusia serta alasan dibalik aneksasi yang dilakukan di Krimea. Dasar dari adanya intervensi dari Rusia ini awalnya karena krisis yang terjadi di Ukraina sampai krisis yang terjadi di Krimea. Krisis di Ukraina berawal saat kepemimpinan Viktor Yakunovych yang saat itu memutuskan untuk tidak menandatangani pakta kerja sama yang ditawarkan oleh Uni Eropa. Hal ini membuat masyarakat pro Eropa melakukan demo besar-besaran hingga akhirnya presiden Yakunovych diberhentikan pada Februari 2014.

Rusia pun menyiagakan pasukan militernya di dekat perbatasan Rusia-Ukraina karena situasi yang tidak kondusif di Ukraina. Rusia beralasan untuk melindungi etnisnya. Tentara Rusia dilengkapi dengan peralatan tempur yang berat dan modern. Hal ini dikatakan melanggar beberapa ketentuan hukum internasional. Selain melanggar hukum internasional aneksasi ini juga menuai kecaman dari berbagai pihak seperti Ukraina, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ukraina memprotes tindakan yang dilakukan oleh Rusia dan meminta bantuan Dewan Keamanan PBB, yang kemudian ditanggapi dengan dilangsungkannya sidang. Penelitian ini menjelaskan bahwa latar belakang dari dilakukannya aneksasi oleh Rusia ini adalah kepentingan untuk melindungi keutuhan wilayahnya, kepentingan militer, kepentingan budaya, serta kepentingan ekonomi.

Beberapa penelitian di atas penulis jadikan acuan untuk beberapa informasi dan data yang dibutuhkan serta berkaitan dengan penelitian penulis, seperti anekasai Rusia di Krimea dan Kebijakan Uni Eropa yang memberikan sanksi kepada Rusia. Namun penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus pembahasan dengan beberapa tinjauan pustaka yang telah dipaparkan di atas. Adapun dalam penelitian ini lebih membahas mengenai alasan atau penyebab Uni Eropa tetap memberlakukan sanksi Internasionalnya terhadap Rusia atas aneksasi Krimea. Walaupun dikatakan sanksi tersebut tidak berjalan sesuai apa yang telah direncanakan dan memberikan dampak negatif bagi Uni Eropa sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif, yang memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi atau menjawab pertanyaan "mengapa". Pada penelitian eksplanatif peneliti tidak hanya menggambarkan terjadinya fenomena tetapi mencoba menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan apa pengaruhnya. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan alasan mengapa sanksi internasional Uni Eropa terhadap Rusia akibat aneksasi yang dilakukannya di Krimea terus diberlakukan menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri Relasional serta konsep Sanksi Internasional dan Aneksasi.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Teori Kebijakan Luar Negeri Relasional**

Kebijakan Luar Negeri Relasional menjadi salah satu hal yang mempengaruhi sikap dan perilaku aktor dalam merumuskan suatu keputusan, baik terkait dengan aktor yang satu maupun dengan aktor yang lainnya. Aktor justru mengambil keuntungan dalam kebijakan ini, yaitu menjadikan kebijakan relasional menjadi salah satu strategi dalam pengambilan keputusannya. Implementasinya menggunakan tindakan yang disertai instrumen yang berbeda-beda baik dalam konteks perang, perdamaian dan konflik disertai dengan situasi yang dapat mengikuti alurnya atau sefleksibel mungkin. Meski demikian, dalam penerapan kebijakan ini lebih cenderung ke arah konflik dan krisis.

Semua aktor memosisikan dirinya untuk membangun hubungan dengan aktor-aktor lainnya yang disebut sebagai kegiatan diplomasi, dalam pertemuan deklarasi unilateral pada konteks hubungan bilateral dan penentuan posisi dalam hubungan multilateral contohnya PBB. Sanksi internasional ini menjadi salah satu Kebijakan Luar Negeri Relasional Uni Eropa yang berusaha untuk mempengaruhi aktor-aktor politik dengan menerapkannya melalui pemberian tindakan serta instrumen yang berbeda-beda. Konteks yang biasanya terkait dengan pengambilan Kebijakan Luar Negeri Relasional adalah konflik, perang, krisis, dan lain sebagainya. Pada dasarnya Kebijakan Luar Negeri Relasional ini bisa dijadikan peluang untuk para aktor sebagai salah satu strategi pada pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan misalnya konflik, perang, dan krisis (Jonsson, 2002).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam Kebijakan Luar Negeri Relasional, terdapat beberapa poin penting yang harus diketahui yaitu yang *pertama*, kebijakan ini mampu mempengaruhi aktor baik dari sikap maupun perilaku serta keterkaitan antara aktor yang satu dengan yang lainnya. *Kedua*, dalam pengimplementasiannya, kebijakan ini menggunakan tindakan dengan instrumen yang berbeda dan disesuaikan dengan situasi perdamaian, perang, dan konflik.

*Ketiga*, aktor memosisikan dirinya dengan aktor lainnya atau berdiplomasi melalui deklarasi unilateral dalam konteks hubungan bilateral dan penentuan posisi dalam pengaturan multilateral seperti PBB. *Terakhir*, kebijakan ini memiliki tujuan yang difokuskan terhadap krisis dan konflik.

Keterkaitan Teori dengan kasus yakni dalam hal pemberlakuan sanksi oleh Uni Eropa yang merupakan salah satu bentuk Kebijakan Luar Negeri Relasional terhadap aneksasi Rusia di Krimea tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat melalui pemaparan beberapa poin di atas. Terkait dengan poin pertama Kebijakan Luar Negeri Relasional Uni Eropa berusaha untuk mempengaruhi para aktor yang terlibat dalam suatu konflik atau krisis (Jonsson, 2002). Dalam hal ini Uni Eropa berusaha untuk memberikan pengaruh terhadap Rusia dengan memberikan kebijakan yang berupa sanksi internasional agar Rusia mau menghentikan tindakannya yang menganeksasi Krimea pada saat itu. Kebijakan tersebut juga menunjukkan dominasi Uni Eropa sebagai sebuah organisasi supranasional di Eropa.

Poin kedua dimana kebijakan tersebut diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi di Krimea, yaitu mengenai perang dan konflik. Kebijakan tersebut diberikan oleh Uni Eropa secara kondisional atau sesuai dengan kondisi yang ada. Poin lainnya terkait dengan tujuan dari kebijakan luar Negeri Relasional yang dikhususkan pada krisis dan konflik. Hal tersebut juga dapat menjelaskan bahwa Uni Eropa telah mengambil kebijakan luar negeri yang relasional berupa sanksi internasional. Lebih lanjut Uni Eropa sebagai sebuah organisasi supranasional tidak memungkinkan untuk memberikan kebijakan yang sifatnya militeristik, karena seperti yang diketahui Uni Eropa merupakan organisasi yang terstruktur, sehingga segala bentuk tindakan atau kebijakan yang akan diberikan telah didasari pada prinsip dan kerangka kerja luar negeri yang telah diatur sebelumnya dengan mapan.

### **Konsep Sanksi Internasional**

Sanksi Internasional adalah aksi yang diambil oleh suatu negara, organisasi internasional, ataupun koalisi negara baik berupa tindakan diplomatik, politik, serta ekonomi. Tindakan tersebut dilakukan untuk membatasi perdagangan, transaksi keuangan dan kegiatan ekonomi lainnya dari target negara atau individu. Sanksi digunakan untuk memberikan tekanan maksimum pada negara. Sanksi internasional juga memiliki tujuan agar dapat merubah perilaku suatu rezim serta mendorong perdamaian, demokrasi maupun stabilitas di suatu wilayah. Terdapat sanksi sepihak dan sanksi kolektif dimana jika sanksi sepihak maka sebuah negara dapat mencoba untuk menyelesaikannya dengan sanksi ekonomi ataupun diplomatik, sedangkan sanksi kolektif dapat diputuskan di tingkat organisasi internasional ataupun regional seperti PBB dan Uni Eropa (Camus, 2022).

Menurut David & Holliday (2012) sanksi internasional merupakan tindakan yang diambil oleh suatu negara kepada negara penerima sanksi atas suatu hal atau permasalahan yang terjadi di negara tersebut, baik secara unilateral maupun multilateral (Khalidun, 2021). Sanksi internasional awalnya digunakan oleh PBB di era modern yang didirikan setelah Perang Dunia I untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan. PBB berupaya untuk mencegah perilaku agresif, sehingga menerapkan sanksi ekonomi di berbagai negara. Berawal dari itu, sanksi internasional dijadikan sebagai alat standar kebijakan luar negeri dengan pengambilan peran utama oleh PBB. Organisasi lainnya seperti Uni Eropa pun mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, contohnya seperti sanksi-

sanksi internasional yang Uni Eropa berikan terhadap Rusia atas aneksasi di Krimea. Sanksi internasional menjadi alat kuat bagi pemerintah dan organisasi internasional yang digunakan untuk menegakkan tujuan kebijakan luar negeri, melindungi hak asasi manusia serta mencegah adanya kegiatan terlarang.

Sanksi internasional yang dapat diterapkan ada beberapa jenis. Sanksi pertama adalah sanksi ekonomi, yaitu kebijakan hukuman untuk negara lain karena ketidaksesuaian tindakan suatu negara dengan harapan dari negara ataupun komunitas lainnya (Ismail, 2020). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan pada ekonomi serta mengubah perilaku negara yang menjadi target. Jenis dari sanksi ini beragam, beberapa diantaranya embargo perdagangan, yang merupakan larangan secara keseluruhan atas perdagangan antara suatu negara dan seluruh dunia. Sanksi jenis ini bertujuan untuk mencegah negara yang ditargetkan mengakses barang, jasa, serta teknologi yang bisa membantu militer dan ekonominya. Jenis sanksi ekonomi berikutnya yakni adanya pembatasan investasi.

Sanksi kedua adalah sanksi diplomatik, yang merupakan bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk memberikan batasan kepada negara target terkait aksesnya ke dunia internasional. Sanksi ini bermaksud memperlihatkan ketidaksetujuan dan menekan negara target agar dapat berperilaku lebih baik. Bentuk-bentuk sanksi diplomatik seperti isolasi diplomatik kemudian penangguhan hubungan diplomatik, serta pengusiran diplomat (*International Sanction*, 2019).

Sanksi ketiga yakni sanksi militer. Sanksi ini merupakan hukuman yang bertujuan untuk membatasi kemampuan militer negara yang dikenakan sanksi. Bentuk-bentuknya yaitu embargo senjata atau larangan komprehensif terkait penjualan, transfer serta penyediaan senjata ke negara yang diberikan sanksi. Selanjutnya zona larangan terbang di dalam sanksi ini terdapat pelarangan pesawat terbang di atas area tertentu, hal ini agar dapat mencegah operasi militer serta serangan udara terhadap penduduk sipil.

Konsep ini dikatakan dapat membantu menjelaskan kasus ini dikarenakan sikap Uni Eropa yang memberikan tindakan terhadap Rusia berupa sanksi-sanksi yang termasuk ke dalam sanksi internasional. Sesuai dengan isi konsep bahwa dalam sanksi ekonomi terdapat pembatasan investasi hal tersebut juga dilakukan Uni Eropa terhadap Rusia dengan dilarangnya investasi untuk aset Rusia dan investasi untuk wilayah Krimea. Tidak berhenti di sanksi ekonomi, Uni Eropa juga menerapkan sanksi diplomatik dimana adanya batasan terhadap negara yang diberikan sanksi, dalam kasus ini adalah Rusia yang dibatasi dan mengalami penangguhan keanggotaan dalam G8. Terakhir adalah sanksi militer, yakni adanya larangan untuk negara-negara anggota Uni Eropa agar tidak memberikan suplai senjata dan perangkat militer untuk Rusia. Dengan ini maka konsep ini digunakan untuk menjelaskan tindakan Uni Eropa terhadap Rusia berupa pemberian sanksi internasional.

### **Konsep Aneksasi**

Aneksasi menjadi salah satu cara utama dari beberapa cara dari suatu negara untuk menduduki atau memperoleh suatu wilayah baik sebagian ataupun seluruh wilayah. (Hofmann, 2020) Aneksasi merupakan salah satu pendekatan paling umum dan tertua untuk menyesuaikan batas kota, sejak awal tahun 1800-an. Namun, aneksasi melambat dari pergantian abad kesembilan belas hingga akhir Perang Dunia II. Aneksasi merupakan cara untuk mendapatkan wilayah dengan

kekerasan atau perebutan dan penaklukan wilayah secara paksa. (Rahman, 2016) Aneksasi juga dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan formal yang dilakukan suatu negara untuk menyatakan kedaulatannya atas wilayah yang sampai sekarang berada di luar daerahnya. Aneksasi dapat dikatakan sebagai tindakan sepihak yang dibuat efektif dengan kepemilikan langsung yang selanjutnya dilegitimasi pengakuan umum. Biasanya, suatu aneksasi dimulai dengan penaklukan maupun pendudukan militer atas daerah yang akan dianeksasi. Dalam piagam PBB aneksasi dikatakan ilegal dan dikutuk (Britannica, 2022).

Reynold (1992) berpendapat bahwa aneksasi dijadikan sebagai alat untuk membuat pertumbuhan suatu wilayah menjadi teratur. Pendapat lainnya yaitu aneksasi di dorong oleh motivasi politik (Austin 1999). Kebijakan untuk menganeksasi dapat digunakan menjadi strategi untuk menajemen pertumbuhan, dimana menurut Reynolds (1992) pendukung aneksasi menganggap bahwa aneksasi dapat menjamin pertumbuhan terjadi secara teratur mengikuti prinsip-prinsip perencanaan penggunaan wilayah.

Menurut Austin (1999) dalam model teoritis terpadu digabungkan dengan bukti empiris, mengidentifikasi bahwa aneksasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, hal ini termasuk keuntungan serta kerugian fiskal, kemudian juga faktor politik seperti keinginan untuk mendiskriminasi. Motif aneksasi juga diketahui sebagai perampasan tanah oleh pemerintah untuk memastikan agar suatu wilayah tidak diambil oleh orang lain, oleh karena itu mereka mencaplok tanah lebih dini.

Penulis menggunakan konsep Aneksasi untuk menjelaskan variabel dependen dari penelitian ini yaitu aneksasi Rusia di Krimea. Konsep ini untuk melihat tindakan Rusia yang ingin merebut secara paksa wilayah krimea dan ingin menjadikannya sebagai bagian dari wilayahnya. Melalui proses penggerakkan militer Rusia yang berada di Krimea serta menambah pasukan militer Rusia yang akan dikirim ke Krimea. Sehingga hal tersebut dikatakan sebagai tindakan yang menganeksasi Krimea.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Aneksasi Rusia Di Krimea**

Pada tanggal 22 Maret tahun 2014 Presiden Viktor Yakunovich Melarikan diri ke Rusia yang menyebabkan pemerintahan di Ukraina kosong, hingga akhirnya kepemimpinannya selesai pada 2014 (Pradana et al., 2023). Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Rusia untuk menganeksasi Krimea. Hal ini dilakukan setelah adanya persetujuan dari Parlemen Federasi Rusia. Intervensi militer Rusia di Krimea menyebabkan hubungan antara Rusia dan Ukraina menjadi tidak harmonis dan secara langsung mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Ukraina menganggap bahwa Rusia telah melanggar kedaulatan wilayahnya dengan mengintervensi Krimea yang berada dalam wilayah kedaulatan Ukraina.

Sesuai dengan konsep aneksasi bahwa tindakan aneksasi memiliki tahap atau proses sehingga dapat dikatakan aneksasi. Pada kasus Krimea ini untuk menduduki Krimea proses aneksasi yang dilakukan Rusia dimulai dengan menggerakkan militernya yang telah berada di wilayah Krimea, pasukan Rusia juga ditambah dengan mengirimkan militer ke Krimea yang merupakan wilayah kedaulatan Ukraina pada 1 Maret 2014 (Sahrir, 2019). Tentara dari Rusia ini dilengkapi dengan peralatan tempur yang modern. Selanjutnya, pada tanggal 13 Maret 2014, di kawasan Ukraina, Rusia telah menurunkan pasukan secara total sebanyak 80.000 anggota militer, 270 tank, 25 kapal dan boats, 380 artileri, dan 40

helikopter. Sedangkan di Krimea diturunkan sebanyak 19.000 pasukan, 40 pesawat terbang, 20 helikopter, 19 kapal militer, 40 artileri, dan 2000 tentara di basis militer yang berada di Ibu kota Krimea. Parlemen Rusia memberikan kewenangan Vladimir Putin untuk mengirimkan pasukan ke Krimea yang kemudian menjadi penguat dari aksi militer yang dilakukannya

Perjanjian aneksasipun dilakukan Rusia agar aneksasinya dapat dilegitimasi. Perjanjian ini sudah disepakatai oleh Vladimir Putin selaku Presiden Rusia, Perdana Menteri Krimea yakni Sergei Aksynove yang saat itu baru dilantik, ketua Parlemen Krimea Vladimir Putin serta Alexei Chaily yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Sevastovol yang setelahnya dikenal dengan perjanjian aneksasi Krimea. Sesudah adanya kesepakatan Vladimir Putin menandatangani dan meligitimasi Undang-undang dan meresmikan Krimea sebagai bagian dari wilayah Rusia. Hal ini berdampak langsung terhadap perluasan daratan Rusia. Tetapi perluasan wilayah darat ini hampir tidak berarti bagi Rusia karena Krimea berkontribusi kurang dari setengah persen dari luas teritorial Rusia. Dari kebijakan aneksasi tersebut Rusia mendapat keuntungan yang besar, seperti penguasaan aset militer, baik yang dimiliki Rusia maupun milik Ukraina yang berada di daerah Krimea. Rusia memiliki sejumlah besar aset militer di Krimea yang mencakup tentara, alutsista, dan beberapa fasilitas pendukung.

Rusia diharuskan membayar sejumlah kompensasi dan mendapatkan pembatasan terhadap kapasitas militer yang diizinkan untuk berada di wilayah Krimea, hal ini sebagai akibat dari adanya keberadaan akses militer ekstrateritorial tersebut. Walaupun demikian, tidak ada lagi kewajiban yang dibebankan terhadap Rusia terkait berbagai kompensasi dan pembatasan aneksasi yang telah terjadi pada 2014 tersebut, yang kemudian kedaulatan Krimea berubah menjadi milik Rusia. Rusiapun mendapatkan kesempatan untuk mengalihkan sedikitnya enam milyar dolar per tahun untuk penguatan Armada Laut Hitam Rusia, sebab perjanjian sebelumnya tidak berlaku lagi. Pasca aneksasi, Armada Laut Hitam Rusia juga mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas yang signifikan. Sumber dari penguatan ini ialah Rusia sendiri serta aset militer Ukraina yang telah diambil alih oleh Rusia. Seluruh Laut Hitam berada dalam lingkup kekuatan militer Rusia setelah jatuhnya Krimea ke tangan Rusia (Oktaviano, 2015). Tindakan Rusia menimbulkan berbagai macam respon dari dunia Internasional. Beberapa diantaranya seperti G7, merupakan organisasi internasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan manusia yang terdiri dari Tujuh negara industri paling kuat. (W, 2012) Kemudian Amerika Serikat Serta Uni Eropa (Ayudhia et al., 2022).

## **Sanksi-sanksi Internasional Uni Eropa Terhadap Rusia atas Aneksasi Krimea**

### **1. Sanksi Diplomatik**

Terjalannya hubungan baik antara Uni Eropa dengan Ukraina menyebabkan Uni Eropa turut menjatuhkan sanksi-sanksi kepada Rusia dengan beberapa bentuk. Hal yang dilakukan oleh Uni Eropa ini merupakan salah satu bentuk dari pengimplementasian Kebijakan Luar Negeri Relasional. Penggunaan sanksi oleh Uni Eropa merupakan bagian dari pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif yang melibatkan dialog politik, upaya pelengkap, dan penggunaan instrumen lain yang tersedia. Seluruh tindakan pembatasan yang diadopsi oleh Uni Eropa sepenuhnya telah sejalan dengan kewajiban di bawah hukum internasional berhubungan juga dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. (Sari, 2021) Sanksi yang Uni Eropa buat berupaya untuk meminimalisir akibat merusak dari

tindakan pembatasan tersebut terhadap penduduk Rusia kemudian fokus pada individu dan entitas yang terlibat dalam konflik Rusia dan Ukraina.

Sanksi pertama yang diberikan Uni Eropa kepada Rusia adalah sanksi diplomatik yakni dengan dikeluarkannya Rusia dari berbagai konferensi internasional seperti KTT G8 dan juga KTT G7 yang mana seharusnya pada bulan Juni 2014 akan diadakan di wilayah Rusia yang bernama Sochi namun dipindah dan akan diadakan di Brussels. Sanksi diplomatik ini juga menyebabkan Rusia ditangguhkan pada negosiasinya untuk bergabung ke dalam *Organization For Economic Cooperation and Development* atau OECD dan Badan Energi Internasional. Bukan hanya demikian, sanksi dalam bentuk diplomatik ini juga mengharuskan KTT antara Uni Eropa dengan Rusia dibatalkan, juga dilakukan penangguhan atas negosiasi bilateral terkait dengan visa serta perjanjian baru antara kedua belah pihak.

Setelah itu, dilakukan juga tindakan pembatasan terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam proses pengalihan Krimea ke Rusia dan tindakan Rusia di Ukraina Timur. Individu-individu ini termasuk pejabat, kelompok bisnis dan pihak-pihak yang berkaitan dengan Kremlin. Dua wilayah penting di Ukraina yaitu Donetsk dan Luhansk termasuk ke dalam sanksi ini. Untuk mewujudkan sanksi ini ada langkah-langkah yang diterapkan oleh Uni Eropa termasuk di dalamnya adalah larangan bepergian dan pembekuan aset luar negeri yang diterapkan secara total menjadi 150 orang dan 37 entitas (Wang, 2015).

## **2. Sanksi Ekonomi**

Langkah-langkah dalam sanksi ini diberlakukan terhadap beberapa sektor tertentu ekonomi Rusia seperti sektor keuangan, perdagangan, transportasi, energi, pertahanan maupun teknologi. (European Council of the European Union, 2023) Pada sanksi ini, banyak larangan yang diberlakukan seperti sanksi keuangan dimana Uni Eropa melarang warga Eropa untuk membeli atau menjual obligasi baru, ekuitas dan instrumen keuangan sejenis lainnya yang jangka waktunya di atas 30 hari atau lebih yang dikeluarkan 5 bank milik negara besar Rusia, 3 perusahaan energi besar Rusia dan 3 perusahaan pertahanan besar Rusia. Sanksi ini mengatur pula larangan untuk memberikan bantuan yang berhubungan dengan penerbitan instrumen keuangan oleh warga negara dan perusahaan Eropa. Larangan untuk memberikan pinjaman dalam jangka 30 hari turut serta diberlakukan. Selanjutnya langkah-langkah sehubungan dengan kerjasama ekonomi. Implementasi program kerjasama bilateral dan regional yang awalnya akan dilakukan oleh Uni Eropa dan Rusia telah dihentikan untuk sementara waktu. Namun, proyek yang menangani kerjasama lintas batas dan masyarakat sipil tetap tidak tersentuh sama sekali. Sanksi-sanksi terkait ekonomi yang telah diberikan Uni Eropa terhadap Rusia telah sejalan dengan artikel 215 dalam TEU (Massaguni, 2017).

Dilakukan juga pembatasan pada Krimea dan Sevastopol. Sebagai pihak yang tidak menerima atas wilayah Krimea yang akan menjadi bagian dari Rusia. Uni Eropa mengambil kebijakan menghentikan hubungan ekonomi dengan wilayah Krimea sendiri. Bersamaan dengan itu larangan untuk berinvestasi di wilayah Krimea juga digencarkan oleh Uni Eropa untuk perusahaan-perusahaan di Eropa maupun Uni Eropa. Sektor pariwisata juga terdampak sebab Uni Eropa melarang untuk menyediakan layanan pariwisata di wilayah Krimea dan Sevastopol. Tidak cukup hingga di larangan impor, Uni Eropa bahkan memberlakukan larangan terhadap ekspor yang berkenaan dengan barang dan teknologi untuk sektor transportasi, telekomunikasi dan energi, dan eksplorasi sumber daya minyak, gas, dan

mineral. Dengan adanya sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia, Uni Eropa menerapkan instrumen damai dalam proses menekan Rusia yang telah mengambil langkah koersif, melanggar integritas teritorial, melanggar norma-norma internasional. Melalui sanksi ekonomi ini Uni Eropa memberikan tekanan agar Rusia tunduk pada norma-norma internasional dan mengembalikan kepemilikan Krimea sebagai bagian dari Ukraina. Sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa terus diberlakukan secara berturut-turut sejak tahun 2014 dan diperpanjang sampai dengan Juni Tahun 2023 (European Council, 2023).

### **3. Sanksi Militer**

Selain penjatuhan sanksi ekonomi Uni Eropa juga menerapkan sanksi Militer terhadap Rusia. Sanksi militer merupakan sanksi yang diberikan agar kemampuan militer negara tujuan dapat dibatasi. Di sini termasuk embargo senjata. Dimana embargo ini memiliki tujuan untuk mencegah senjata dan peralatan-peralatan militer sampai ke negara yang menjadi target, impor dan ekspor senjata dan bahan terkait lainnya pun dilarang. Selain itu dapat terjadi pelarangan komunikasi ataupun transaksi keuangan yang berhubungan dengan tindakan militer (Government of Canada, 2020).

Adapun dalam kasus aneksasi Krimea ini hal yang dilakukan Uni Eropa adalah melarang negara-negara anggota untuk menyuplai senjata dan perangkat keras militer untuk Rusia. Kemudian Inggris dan Jerman pun menghentikan kerjasama militer dengan Rusia. Namun, dengan adanya sanksi ini justru terdapat kerugian untuk Uni Eropa. Dari pembatalan kerjasama penyediaan bahan untuk seragam militer Rusia, London kehilangan \$133 juta. (Muhammad, 2021) Jerman yang memasok senjata penembak jitu dan terlibat dalam pelatihan tempur digital di Mulino, Nizhny Novgorod harus rela kehilangan \$100 juta (Muhammad, 2021). Perancis sebagai mitra militer terbesar Rusia awalnya masih melihat dan tidak bertindak. Karena kontrak antara Rusia dan Perancis sangat tinggi nilainya, selain itu terdapat juga rencana pembangunan dua unit kapal tambahan di Rusia. Paris dan Moskow juga memiliki tiga kontrak yang besar dalam hal pasokan kendaraan lapis baja serta pesawat tempur. Meski demikian, pada akhirnya Perancis pun juga turut menekan Rusia. Perusahaan senjata Rusia yaitu United Aircraft Corporation, Oboronprom dan Uralvagonzavod dibatasi kerja samanya dengan perusahaan senjata Uni Eropa.

## **Dampak Sanksi Internasional Uni Eropa Terhadap Rusia ata Aneksasi Krimea**

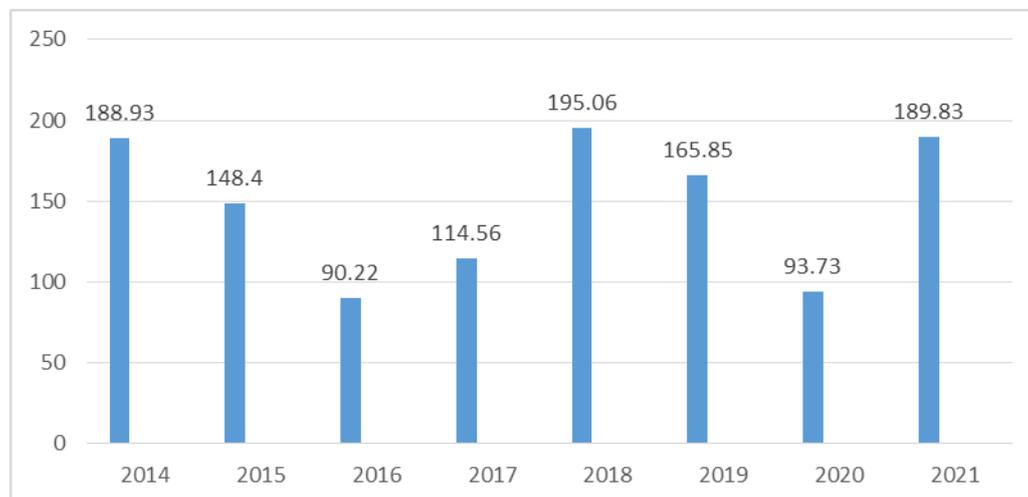
### **Dampak Sektor Ekonomi**

Secara konkret PDB Rusia telah mengalami penurunan, ekonomi Rusia mengalami pertumbuhan sebanyak 0,6% sebelum kuartal pertama 2015, ketika terdapat tekanan dari ekonomi global dan tekanan yang disebabkan oleh sanksi karena terjadinya aneksasi Krimea (Mukhlis, 2016) Menyusul dengan rubel Rusia yang mengalami penurunan, yang awalnya di 2014 46 rubel ke Euro (RUB/ EUR) di bulan Desember 2014 malah menjadi 85 RUB/ EUR. Rusia juga kehilangan akumulasi mata uang hampir 50% terhadap US dolar (Massaguni, 2017). Rubel Rusia yang mengalami devaluasi ini disebabkan oleh sanksi keuangan yang Uni Eropa keluarkan serta besarnya penurunan harga minyak. Adapun pemicu penurunan harga ini adalah tidak dibatasinya ekstraksi minyak mentah yang merupakan keputusan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Selanjutnya, terjadi peningkatan inflasi dalam waktu yang singkat. Selama tahun 2014, di semester kedua tahun itu inflasi rata-rata 8% meningkat ke 16% pada tahun 2015,

lalu pada 2016 turun menjadi di bawah 13%. (Massaguni, 2017) Terpuruknya ekonomi Rusia bukan semata-mata disebabkan oleh sanksi ekonomi, namun yang juga berperan besar adalah menyusutnya harga minyak. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kholodin dan Writenberg bahwa Rusia bergantung pada pendapatan yang bersumber dari penjualan gas dan minyak. Kondisi kredit Rusia juga sudah Rusia karena pembatasan Eropa pada akses Rusia ke pasar keuangan internasional, yang mana hal ini memberikan dampak negatif pada konsumsi dan investasi di Rusia (Oxenstierna, 2015)

Setelah sanksi ekonomi diterapkan, pertumbuhan PDB Rusia menjadi tidak signifikan. Tahun 2014 hampir nol, menurut perkiraan IMF hanya 0,2%, menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) 0,5% serta menurut *European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD) adalah 0 (Wang, 2015). Sanksi impor yang diberikan oleh Uni Eropa juga memiliki pengaruh pada pasokan bahan makanan Rusia, dikarenakan sepiempat impor makanan Rusia sumbernya dari Uni Eropa. Pengaruhnya dapat dilihat dari terjadinya inflasi pada harga pangan. Awal 2014, menurut *Trading Economics* setidaknya terjadi inflasi sedikit di atas 5% pada harga pangan, yang seterusnya meningkat dengan cepat menjadi hampir 10% setelah konflik dimulai. Inflasi pun terus meningkat setelah sanksi impor diberlakukan yang awalnya pada Desember 2014 sekitar 16,4%, lalu pada bulan Januari 2015 menjadi 22,8% (Massaguni, 2017). Harga pangan Rusia memang terus meningkat sebelum diberlakukannya sanksi, akan tetapi setelah diberlakukannya sanksi Uni Eropa harganya menjadi bertambah mahal.

Tabel 4.1 Grafik Perkembangan Ekonomi Rusia Pasca Penerapan Sanksi Uni Eropa



Sumber: The Statistic Portal Russia Trade Balance of Goods (Russia Balance of Trade, 2022)

#### 4.3.1 Dampak Politik

Dampak bagi Rusia sendiri yang dapat dilihat dari adanya sanksi atau pembatasan pertama terhadap individu tertentu, yakni akan menimbulkan apa yang disebut dengan *rally around the flag effect*. Sanksi tersebut yang pada awalnya bertujuan agar menggoyahkan dukungan publik terhadap pemerintah, namun justru sebaliknya sanksi ini memberikan bantuan kepada pemerintah Rusia untuk memobilisasi dan memberi dukungan terhadap pemerintah di Rusia. Sanksi individu

tersebut telah dijadikan sebagai motivasi oleh orang-orang Rusia untuk mengembangkan sikap patriotisme dan nasionalisme.

Sebagai tanda solidaritas patriotik mereka dengan tanah air dan kepemimpinan politik Rusia, seluruh individu yang sudah ditargetkan oleh pembekuan aset dan pembatasan perjalanan pada sanksi tersebut menyatakan eksistensi mereka di daftar Uni Eropa. Jika dilihat dari survei opini publik Levada Center, sejak diberlakukannya sanksi tersebut peringkat popularitas Presiden Rusia dengan cepat menjadi meningkat. Sebagian besar penduduk Rusia memercayai bahwa gagasan dibalik tindakan sanksi pembatasan yang dikenakan kepada Rusia tersebut adalah untuk melemahkan ekonomi Rusia dan menyebabkan ketidakstabilan negara. Pendapat warga Rusia terbukti dengan kerugian-kerugian ekonomi yang akhirnya dialami oleh Rusia sejak tahun 2014 (Frassminggi Kamasa, 2014).

Selain itu hubungan dengan Tiongkok menjadi semakin kuat. Rusia memang telah mengalami kejatuhan ekonomi dengan adanya sanksi yang diberikan Uni Eropa, akan tetapi di samping itu juga merasakan dampak positif dari adanya sanksi tersebut. Kedua belah pihak sering bergantian saling mengirim senjata untuk keperluan militer, Rusia-Tiongkok juga berbagi tapal wilayah serta tidak jarang sependapat di Dewan Keamanan PBB. Putin pernah berkunjung ke Tiongkok pada tahun 2014 untuk menandatangani kurang lebih 40 perjanjian ekonomi dengan Presiden Tiongkok, di dalamnya termasuk perjanjian mengenai kerja sama energi yang dimulai dari tahun 2018 yang bernilai \$400 miliar selama 30 tahun (Andrea Kendall-Taylor, 2022).

Dalam transaksi perdagangannya juga kedua belah pihak setuju untuk menggunakan mata uang rubel dan yuan. Jika demikian maka penggunaan dolar Amerika Serikat akan dikesampingkan. Moskow dan Beijing berharap dominasi dolar Amerika sebagai alat tukar dapat dilemahkan dengan adanya cara tersebut. Adanya persetujuan antara Rusia dengan Barat sehubungan dengan Krisis Ukraina, membuat Rusia mendapatkan keuntungan melalui kerja samanya dengan Tiongkok baik secara finansial dan ekonomi utamanya bidang energi. Setelah adanya sanksi yang diterapkan membuat hubungan Rusia dengan Barat menjadi renggang namun juga membuat hubungan Rusia mengalami kemajuan dengan Tiongkok. Di mana kedua negara melakukan kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral, dengan menggunakan forum-forum internasional juga. Kerja sama keduanya makin erat terutama pada bidang pertahanan. Penjualan senjata dan kerja sama teknis menjadi berkembang (Andrea Kendall-Taylor, 2022).

Kuatnya isolasi barat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Rusia menjadi terpengaruh. Seperti yang diketahui bahwa ekonomi Rusia telah mengalami penurunan sejak tahun 2014. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa upaya penguatan hubungannya dengan Tiongkok adalah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Rusia melalui perdagangan internasional. Pada tahun 2003 jumlah volume perdagangan bilateral sebanyak \$15,8 miliar yang pada tahun 2014 mencapai \$95,3 miliar, dengan ini Rusia berharap dapat memiliki pencapaian sebesar \$100 miliar (Muhammad, 2021).

Hubungan militer Rusia dan Tiongkok juga semakin meningkat. Tekanan Uni Eropa membuat Rusia berusaha untuk mencari aliansi baru dan meningkatkan lagi hubungan diplomatiknya dengan negara-negara Timur terutama Tiongkok. Rusia membutuhkan negara kuat yang bisa membuat kekuatan militernya dan agar

eksistensinya kekeuasannya di mata internasional bisa meningkat sehingga tujuan nasionalnya dapat terpenuhi. Kekuatan militer dari segi kualitas dan kuantitas persenjataan serta pasukan militer yang sangat besar menjadi daya tarik Putin untuk melakukan kerja sama di bidang militer dengan Tiongkok. Tiongkok pun menyambut baik apa yang ditawarkan Putin.

### **Alasan Uni Eropa Tetap Memberlakukan Sanksi Internasional Terhadap Rusia Atas Aneksasi Krimea**

Uni Eropa memberikan sanksi internasional kepada Rusia dikarenakan Aneksasi yang dilakukannya di Krimea. Sebelumnya telah diberikan hanya berupa peringatan dan sanksi diplomatik. Sanksi-sanksi internasional yang Uni Eropa berikan kepada Rusia diharapkan mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan serta mencegah perbuatan Rusia. Rusia pun memang telah mengalami kejatuhan ekonomi akan tetapi danya sanksi tersebut tidak memberikan efek jera terhadap Rusia dan malah memberikan dampak yang kurang baik bagi Uni Eropa sendiri. Awalnya sanksi yang mulai di berlakukan pada Maret 2014 ini akan berakhir pada Juli 2014 (Arimbi, 2022). Akan tetapi Rusia tidak menyerah dan malah memberikan sanksi balasan kepada Uni Eropa. Hingga pada akhirnya Uni Eropa terus memberlakukan sanksinya lagi sampai dengan tahun hingga Juli 2016. Inipun masih membuat Rusia tidak menyerah akan aneksasi Krimea.

Perpanjangan sanksi kembali dilanjutkan sampai dengan 23 Juni tahun 2017, sanksi tersebut adalah larangan pembekuan aset dan larangan visa, larangan impor produk-produk yang dihasilkan Krimea dan pelabuhan sevastopol, pemblokiran investasi Eropa di wilayah tersebut serta larangan ekspor Eropa yang menargetkan telekomunikasi, transportasi dan sektor energi di Krimea (*Uni Eropa Perpanjang Sanksi Terhadap Rusia Atas Aneksasi Krimea*, 2016). Uni Eropa lalu melanjutkan perpanjangan sanksi internasional yang telah diberlakukan hingga Juli 2019 inipun dengan target sektor-sektor tertentu. Penetapan keputusan ini menyusul dari Presiden Perancis dan Kanselir Jerman ke Dewan Eropa pada Desember tahun 2018 tentang status perjanjian Minsk, di mana dikaitkan dengan sanksi secara keseluruhan. Dewan Eropa membuat keputusan politik untuk terus mengencakan sanksi terhadap Rusia dikarenakan Rusia yang tidak mengubah keputusan politiknya dan terus menganeksasi Krimea (Arimbi, 2022).

Meski tidak dapat membuat Rusia menghentikan tindakannya untuk mengankesasi Krimea, Uni Eropa masih terus melanjutkan pemberlakuan sanksi internasional kepada Rusia. Ini disebabkan oleh Uni Eropa yang menjadikan sanksi internasionalnya sebagai alat untuk mempromosikan tujuan dari *Common Foreign and Security Policy (CFSP)* yakni perdamaian, demokrasi serta menghormati *rule of law*, hak asasi manusia dan hukum internasional. Diberlakukannya sanksi internasional tersebut bukan untuk tujuan hukum semata namun juga memiliki maksud untuk membawa perubahan politik ke negara tujuan dalam hal ini adalah Rusia. Sanksi berupaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya tindakana Rusia.

Uni Eropa sendiri membangun identitasnya untuk menciptakan perdamaian dunia, dimana setelah PD II Uni Eropa menjadikan perdamaian sebagai tujuan utama dalam proses integrasinya. Terdapat dokumen-dokumen yang berupaya untuk membangun identitas Uni Eropa yakni *Declaration on European identity 1973*, *treaty on European Union 1992* dan *Treaty of Lisbon 2007*. Fahmi, "Analisis Keberlangsungan Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Rusia yang Dianggap Mengankesasi Krimea Periode 2014-2019." Negara-negara anggota sebelumnya

sealing berperang satu sama lain, namun mereka bekerja sama untuk menciptakan perdamaian setelah tergabung ke dalam Uni Eropa. Ketiga dokumen tersebut pun telah menjelaskan bahwa Uni Eropa didirikan untuk menciptakan perdamaian. Komitmen yang Uni Eropa miliki untuk menciptakan perdamaian dunia kemudian diwujudkan dalam Kebijakan Luar Negeri Relasionalnya. Kebijakan ini berupa sanksi-sanksi internasional yang Uni Eropa berikan kepada Rusia untuk menekannya serta memberikan bantuan kepada Ukraina saat adanya krisis karena aneksasi yang terjadi di Krimea oleh Rusia. Uni Eropa masih terus memberikan sanksi terhadap Rusia juga dikarenakan tuntutan norma yang berdasar pada *Council Common Position* 2008/94/CFSP (Fahmi, 2020).

*Common Position* merupakan norma atau aturan yang dirancang dengan berbagai sanksi baik sanksi diplomatik maupun sanksi ekonomi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang melanggar hukum internasional, hak asasi manusia ataupun kebijakan yang tidak menghargai hukum serta prinsip-prinsip demokrasi. Acuan Uni Eropa terkait konsistensinya dalam memberlakukan sanksi terhadap Rusia adalah salah satu norma yang didefinisikan dalam *Common position* yakni tentang tindakan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan, pantas atau tidaknya untuk dilakukan sehubungan dengan ekspor teknologi dan barang militer untuk negara anggota Uni Eropa sendiri. Keputusan Uni Eropa untuk terus memberlakukan sanksi internasionalnya dilihat memang tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap sanksi yang diberikan Rusia, sebab pada dasarnya Uni Eropa memiliki komitmen untuk terus menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Uni Eropa selalu mengambil bagian untuk berupaya menyelesaikan suatu konflik dalam kebijakan luar negerinya.

Selain dari beberapa alasan di atas, jika ditelusuri dari banyaknya campur tangan Amerika Serikat dalam merespon konflik dan pemberian sanksi kepada Rusia sehubungan dengan konflik Krimea, bisa dilihat pula bahwa terdapat keterlibatan Amerika Serikat dari tetap diberlakukannya sanksi Uni Eropa tersebut. Jika membahas mengenai AS, sebelumnya memang telah terjalin hubungan antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa. Amerika Serikat sudah menjadi mitra strategis utama Uni Eropa dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia. Keduanya menjadi pendonor bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan terbesar di dunia (The, 2021). Mereka yang sama-sama merupakan kekuatan besar tentu dapat saling mempengaruhi dalam beberapa hal termasuk dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Dikatakan terdapat intervensi dalam perpanjangan sanksi Uni Eropa dapat dikaitkan dengan solidaritas atlantik, dimana solidaritas atlantik ini erat kaitannya dengan NATO sebagai organisasi Kawasan dan Amerika Serikat sebagai pelindung terutama dalam bidang keamanan dan militeristik. NATO sendiri telah menyatakan ketersediaannya untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di Eropa menggunakan kemampuan militernya salah satu contohnya seperti intervensi yang dilakukan di Balkan. Karena tindakan militer berasal dari NATO alih-alih dari PBB, jadi Eropa merasa memikul beban terkait dengan keterlibatan NATO tersebut. (Daalder, 2000) Tidak bisa dipungkiri bahwa NATO dan Amerika Serikat, secara konkrit memang berfungsi dan berperan besar sebagai penyedia keamanan bagi sebagian besar negara-negara di Uni Eropa.

Ancaman-ancaman yang berada di sekitar Uni Eropa seperti Uni Soviet, lemahnya militer Eropa Barat, Amerika Serikat sebagai superior dalam bidang militer, menjadi faktor penting pertimbangan Uni Eropa bahwa memang keamanan

wilayahnya sangat bergantung pada solidaritas atlantik. Ketergantungan militer pada Amerika tidak hanya terkait dengan pertahanan kawasan, namun juga menjadi parameter penentu kebijakan luar negeri Uni Eropa sebagai organisasi di kawasan. Dalam urusan perlindungan kawasan ini Uni Eropa membayar mahal dan hal ini berpengaruh bagi arah kebijakan luar negerinya salah satunya seperti masih terus diberlakukannya sanksi terhadap Rusia terkait Aneksasi krimea(Missiroli, 2017).

Lebih lanjut pemberian sanksi yang diberikan Uni Eropa sebenarnya telah ada koordinasi dengan sanksi AS, ini kemudian yang membuat kerja sama dalam sanksi menjadi sebuah ekspresi yang nyata dari adanya solidaritas antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dapat dilihat pula bahwa sanksi yang diberikan Uni Eropa tidak terlalu berbeda atau bahkan mendekati identik. Contohnya seperti AS yang melarang secara langsung semua investasi baru di Rusia, lalu Uni Eropa melarang dalam hal yang mencakup sektor pertambangan, penggalian maupun energi(Szczepański, 2023).

## **KESIMPULAN**

Rusia menganeksasi Krimea dan merebut secara paksa wilayah Krimea menjadi bagian dari teritorialnya pada tahun 2014. Tindakan ini menimbulkan berbagai respon dari dunia internasional, termasuk Uni Eropa yang mengecam perbuatan Rusia dengan mengambil Kebijakan Luar Negeri Relasional berupa beberapa sanksi internasional seperti sanksi diplomatik, sanksi militer dan sanksi ekonomi. Sanksi Uni Eropa tidak terlalu efektif untuk menghentikan Rusia. Meskipun sanksi-sanksi internasional tersebut dinyatakan tidak efektif karena tidak dapat menghentikan perbuatan Rusia bahkan berdampak negatif bagi Uni Eropa sendiri, hal tersebut tidak membuat Uni Eropa berhenti untuk memberikan sanksi internasionalnya terhadap Rusia.

Hal ini dikarenakan adanya identitas yang telah dibangun Uni Eropa di mata internasional sebagai pencetus perdamaian dunia. Penerapan sanksi secara konsisten menunjukkan komitmen Uni Eropa sebagai organisasi yang menunjung tinggi dan menjaga perdamaian dunia. Keputusan Uni Eropa ini juga tidak terlepas dari tuntutan *Common Position* 2008 yang menjadi panduan atau norma yang harus dipertimbangkannya dalam melakukan suatu hal atau mengambil keputusan. Selain itu, Uni Eropa merasa bertanggung jawab untuk membantu Ukraina untuk mewujudkan perdamaian yang diatur dalam *EU Common Position* 2008. Serta adanya pengaruh dari Amerika Serikat dan NATO, karena bergantungnya Uni Eropa terhadap solidaritas atlantik. Uni Eropa bergantung agar dapat tetap menjaga keamanan negara di kawasannya, inilah yang kemudian mempengaruhi juga arah kebijakan luar negerinya terkait terus diberlakukannya Sanksi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Kendall-Taylor, D. O. S. (2022). *Best and Bosom Friends: Why China-Russia Ties Will Deepen after Russia's War on Ukraine*. Center for Strategic & International Studies. <https://www.csis.org/analysis/best-and-bosom-friends-why-china-russia-ties-will-deepen-after-russias-war-ukraine>
- Anggraini, C. N. (2018). *Kebijakan Rusia Dalam Menganeksasi Krimea Pasca Penjatuhan Sanksi Ekonomi Oleh Uni Eropa* [Universitas Andalas]. [http://scholar.unand.ac.id/35791/2/BAB I.pdf](http://scholar.unand.ac.id/35791/2/BAB%20I.pdf)
- Arimbi, R. P. (2022). *Rasionalita Perpanjangan Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Rusia Pasca Aneksasi Krimea Tahun 2014* [Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/88266/31/PENDAHULUAN.pdf>
- Ayudhia, L., Yuniarti, Y., & Wirawan, R. (2022). Amerika Serikat dalam Rivalitas Ukraina-Rusia: Intervensi pada Konflik Krimea dan Laut Azov. *Interdependence Journal of International Studies*, 3(1), 29–42. <https://doi.org/10.54144/ijis.v3i1.50>
- Britannica, T. E. of E. (2022). *Annexation*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/annexation>
- Camus, A. (2022). *Sanction (Diplomatic, Economic, or Military)*. Practical Guide to Humanitarian Law. <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/sanctions-diplomatic-economic-or-military/>
- Daalder, I. H. (2000). *Europe: Rebalancing the U.S.-European Relationship*. Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/europe-rebalancing-the-u-s-european-relationship/>
- European Council. (2023). *EU restrictive measures against Russia over Ukraine (since 2014)*. Council of the European Union. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/>
- European Council of the European Union. (2023). *EU Restrictive Measures Against Russia over Ukraine (Since 2014)*. European Council of the European Union. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/>
- Fahmi, S. A. (2020). Analisis Keberlangsungan Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Rusia yang Dianggap Menganeksasi Krimea Periode 2014-2019. *Journal of International Relations*, 6(4), 10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/28686/0>
- Frassminggi Kamasa. (2014). Krisis Ukraina dan Dampaknya terhadap Tatanan Politik Global dan Regional. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(1), 79–108. <http://eng.kremlin.ru/news/4145>,
- Government of Canada. (2020). *Types of Sanctions*. Government of Canada. [https://www.international.gc.ca/world-monde/international\\_relations-relations\\_internationales/sanctions/types.aspx?lang=eng](https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/types.aspx?lang=eng)
- Hofmann, R. (2020). *Annexation*. Oxford Publik International Law. <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1376>
- International Sanction*. (2019). Sanction Scanner. <https://sanctionscanner.com/knowledge-base/international-sanctions-113>

- Iskandar, S. N. A. (2020). *Aneksasi Semenanjung Krimea di Ukraina oleh Rusia Dihubungkan dengan Prinsip Kedaulatan Dalam Hukum Internasional* [Universitas Pasundan Bandung]. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/48813>
- Ismail, A. (2020). Sanksi Ekonomi dalam Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional: Resensi Buku. *Indonesian Perspective*, 5(1). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/30197/17182>
- Jonsson, C. (2002). *Diplomacy, Bergaining and Negotiation*, (R. and B. Simmons Carlsnaes, W. (Ed.)). Handbook of International Relations.
- Kartini, I. (2014). Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi Bagi Ukraina. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 27–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.199>
- Khaldun, R. I. (2021). Impilikasi Konflik Kudeta Militer Myanmar terhadap Sanksi Internasional. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 3(1), 14–22. <https://ijpss.unram.ac.id/index.php/ijpss/article/download/77/25>
- Mahfud Massaguni, Muhammad Nasir Badu, M. A. S. (2022). Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/21011>
- Massaguni, M. (2017). *Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia atas Krisis Ukraina* [Universitas Hasanuddin]. [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/NWQwYjk0NTBhOTFmY2MwMzcwMmViYjhiM2NmMjY0MjA3MmQ0OGI1MA==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NWQwYjk0NTBhOTFmY2MwMzcwMmViYjhiM2NmMjY0MjA3MmQ0OGI1MA==.pdf)
- Missiroli, A. (2017). The EU and The World: Players and Policies Post-Lisbon. In *A Handbook*. [www.iss.europa.eu/uploads/media/EU\\_Handbook.pdf](http://www.iss.europa.eu/uploads/media/EU_Handbook.pdf).
- Muhammad, A. (2021). Aneksasi Rusia atas Krimea, Sanksi Uni Eropa, dan Penguatan Hubungan Strategis antara Rusia-Tiongkok. *Insignia Journal of International Relations*, 8(2). <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/3528>
- Mukhlis, A. (2016). *Konflik Ukraina Dan Rusia Terkait Masalah Status Krimea* [UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA JAKARTA]. <https://usni.ac.id/repository/index.php?p=fstream-pdf&fid=514&bid=520>
- Oktaviano, D. R. (2015). *Kepentingan Rusia Me-aneksasi Semenanjung Krimea Tahun 2014*. 7(1), 1898–1913. <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/3188/3104>
- Oxenstierna, S. (2015). *The economic sanctions against Russia Impact and prospects of success*. September. [https://pure.au.dk/portal/en/publications/the-economic-sanctions-against-russia-impact-and-prospects-of-success\(f1d34d4f-5c5f-4a38-82e9-c1df647caeb7\).html](https://pure.au.dk/portal/en/publications/the-economic-sanctions-against-russia-impact-and-prospects-of-success(f1d34d4f-5c5f-4a38-82e9-c1df647caeb7).html)
- Pradana, H. A., Adielah, U., Studi, P., Internasional, H., & Malang, U. M. (2023). *Strategi Konfrontatif Rusia Melalui Kebijakan Operasi Militer Khusus ke Ukraina Hafid Adim Pradana 1\**, Ubaidah Adielah 2. 8090, 274–283. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23258>
- Rahman, R. H. (2016). *Aneksasi Crimea oleh Rusia* [Universitas Jember]. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77804>
- Russia Balance of Trade*. (2022). Trading Economics. <https://tradingeconomics.com/russia/balance-of-trade>

- Sahrir, I. (2019). Aneksasi Rusia Terhadap Krimea Tahun 2014. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1), 043–054. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/1302045089 - Irvand Sahir \(10-09-18-04-22-27\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/1302045089 - Irvand Sahir (10-09-18-04-22-27).pdf)
- Sari, R. I. (2021). Penjatuhan Sanksi Uni Eropa ats Tindakan Aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina. *Belli Ac Pacis*, 7(1).
- Siregar, D. M. (n.d.). Efektivitas Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Rusia Dalam Kasus Aneksasi Krimea. *JOM FISIP*, 4(1), 1–18. [https://digilib.unri.ac.id/index.php/index.php?p=show\\_detail&id=71698&keywords=](https://digilib.unri.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=71698&keywords=)
- Szczepański, M. (2023). *Russia's War on Ukraine: US sankctions*. European Parliamentary Research Service. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS\\_BRI\(2023\)739358](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)739358)
- The, A. T. of the E. D. to the U. S. (2021). *The European Union and the United State: A strong EU-U.S partenership is crucial to building a more democratic, secure, and prosperous world*. An Official EU Website. [https://www.eeas.europa.eu/united-states-america/european-union-and-united-states\\_en?s=253](https://www.eeas.europa.eu/united-states-america/european-union-and-united-states_en?s=253)
- Ukraine Crisis: Timeline*. (2014). BBC. [https://www.bbc.com/news/world/us\\_and\\_canada](https://www.bbc.com/news/world/us_and_canada)
- Uni Eropa Perpanjang Sanksi terhadap Rusia atas Aneksasi Krimea*. (2016). Voa Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/uni-eropa-perpanjang-sanksi-terhadap-rusia-atas-aneksasi-krimea/3382584.html>
- W, B. S. (2012). *Aneksasi Crimea Dalam Perspektif Group Of Seven Dan Hukum Internasional*. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/25899/>
- Wang, W. (2015). *Impact of Western Sanctions on Russiaa in The Ukraine Crisis*. 8(2), 1–6. <https://doi.org/10.5539/jpl.v8n2pl>